



NOTARIS

BISTOK SITUMORANG, SH

SK. MEN.KEH. RI. No. C-618.HT.03.01 - Th. 1999
TANGGAL : 2 MARET 1999

Jl. Raya Cisaat No. 161 A, Sukabumi, Telp. (0266) - 235943

Tanggal : 4 Juni 1999.

Nomor : -1-

- PT. SENTRAL SISTEM PENGEMBANGAN MUTU -

PERSEROAN TERBATAS

PT. SENTRAL SISTEM PENGEMBANGAN MUTU

Nomor : 11-

-- Pada hari ini, Jumat, empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (4-6-1999). -----

-- Berhadapan dengan saya, BISTOK SITUMORANG, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, berkedudukan di Kemang, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akt. ini dan saya, Notaris Kenal; -----

1. -Tuan IMANUEL IMAN, lahir di Jakarta pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (16-8-1969), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Dalam IX/7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5404.160869.0343, yang berlaku sampai dengan enam belas Agustus dua ribu dua (16-8-2002), Warga Negara Indonesia; -----

2. -Nona TATI RINA, lahir di Bogor pada tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (9-5-1974), Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kebon Pedes, Rukun Tetangga 002, Rukun Warg 009, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Sereal, Kotamadya Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5106.490574.0001, yang berlaku sampai dengan sembilan Mei dua ribu (9-5-2000), Warga Negara Indonesia; -----
-- Para penghadap untuk sementara berada di Cisaat



-- Para penghadap menerangkan dengan tidak -----
menurangi izin yang berwajib dengan ini mendirikan
satu Perseroan Terbatas dengan memakai anggaran
dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. SENTRAL -----
SISTEM PENGEMBANGAN MUTU", (selanjutnya dalam --
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta; -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -
ditempat lain, baik didalam maupun diluar -----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
anggota Komisaris perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----
-berusaha dalam bidang jasa konsultasi managemen
mutu; -----
2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --
usaha sebagai berikut : -----
 - a. Memberikan jasa konsultasi managemen sistem -
standar mutu internasional; -----

- b. Memberikan jasa konsultasi manajemen sistem -----
| peningkatan produktifitas kinerja produksi; -----
- c. Memberikan jasa konsultasi manajemen personalia;
- d. Memberikan jasa konsultasi manajemen pelatihan --
| keterampilan sumber daya manusia terutama dibidang
| standar mutu; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

- 1. -Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 20.000.000,- --
(dua puluh juta rupiah) dan terbagi atas 200 (dua --
ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal -
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- 2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh --
para pendiri, yaitu: -----
-Tuan IMANUEL IMAN sebanyak 25 --
(dua puluh lima) saham dengan ---
bernilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp. 2.500.000,
(dua juta lima ratus ribu -----
rupiah); -----
-Nona TATI RINA sebanyak 25 (dua-
puluh lima) saham dengan bernilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000,
(dua juta lima ratus ribu -----
rupiah); -----
-sehingga seluruhnya berjumlah --
50 (lima puluh) saham atau -----
bernilai nominal sebesar Rp. 5.000.000.
(lima juta rupiah); -----
- 3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap --

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau -- seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ----- rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat ----- penanda-tanganan akta ini. -----

4. Saham saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal -- Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang --- Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu - untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)--- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing --- masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----- (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih -- ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) -- hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang ----- saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak ----- diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus --- menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada ----- karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang ---- tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas --- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. ---

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum --- Indonesia. -----
3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. -Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. -Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. -Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- S U R A T · S A H A M -----

----- Pasal 6. -----

1. -Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2. -Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. -Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: ---
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. ---
2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----- kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita -- acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----- saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan --- mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat ---- Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap --- Perseroan.
5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang --- berkepentingan.
6. -Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif --- saham.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. -Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan --- Perseroan.
2. -Dalam daftar pemegang saham itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektip saham yang dimiliki para --- pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain .

- selain uang; dan -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----- Direksi. -----
3. -Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai ---- kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris ----- beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada --- Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ---
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ----- Direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ----- segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang -- saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat ----- pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham. -----
5. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara----- daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik ----- baiknya. -----
6. -Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus pada waktu jam kerja kantor - Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

- Pasal 9. -----
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ---- pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil - mereka yang sah. -----
2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.-

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ----- apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar telah ----- dipenuhi. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas ----- saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----- Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila ----- seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan ----- Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) ----- tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan ----- untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu ----- kepada seorang warga Negara Indonesia atau suatu ----- Badan Hukum Indonesia, menurut ketentuan anggaran ----- dasar. -----
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini ----- belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap ----- tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham ----- itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ----- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, ----- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur ----- Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ----- hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----

persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 -- (lima) tahun serta dapat diangkat kembali dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 3. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segal tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; harus dengan persetujuan anggota Komisaris.
- 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian

besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun -----
buku baik dalam satu transaksi atau beberapa -----
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -----
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan -
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau -----
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling ---
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari-
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam rapat. -----

5. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan --
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas -----
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 4 pasal ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua)--
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar -
di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 -----
(tigapuluhan) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan
hukum tersebut. -----
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta mewakili Perseroan. -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang
diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ---
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ---
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan --
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----
Ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----
mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas)

- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga ----
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh-
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari--
anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan Surat Kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai-
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan Kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau

lebih diantara mereka atas tanggungan mereka ----- bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisari Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----- permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suar yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisari Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----- setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda teri yang layak, paling lambat sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwar-

- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga -- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan;
 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain

yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. -Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahui secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

----- T A H U N - B U K U -----

----- Pasal 16. -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian

imi dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember
dua ribu (31-12-2000). -----

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah ---
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan ----
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota-
Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat ---
Umum Para Pemegang Saham tahunan. -----
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di -
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari -
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ---
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para -----
Pemegang Saham. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 17. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : --
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana ----
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya ----
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang -
Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ---
kebutuhan. -----
2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ---
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan --

tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----

a. -Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang ---
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi ---
dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan
atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan
rapat. -----

b. -Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai ---
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan
dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan
dan perubahannya selama tahun buku serta rincian
masalah yang timbul selama tahun buku yang ---
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan
persetujuan rapat. -----

c. -Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. -Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar. -----

3. -Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepienuhnya kepada ---
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk ---
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang ---

saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat -----
Izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19. -----

1. -Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu -----
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis -----
tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan -----
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan -----
disertai alasannya. -----
3. -Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan
itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan --
berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan -
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri --
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan. -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri
yang memberi izin tersebut. -----

--- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

----- Pasal 20. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ---
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha. -----
2. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan ---
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling ---
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat.
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. -----
3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan ---
sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia
dikantor Perseroan. -----
4. -Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang
sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan
terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat ---
diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai
hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum
Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga
dalam Wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. -Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang Direksi, dalam hal seluruh anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dari pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -- apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. --
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. --
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
d. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. --
e. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --
f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. --
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. --
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk --

- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
 6. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----
 7. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
 9. -Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---
tersebut. ---

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

----- PENGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ---
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ---
ditentukan oleh rapat tersebut. -----
2. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak -
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah -
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undan-
undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai -
dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ---
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sam-
sekali tertutup. -----
4. -laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ---
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan
untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan -
yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam

dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --- bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. ---
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. ---
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. ---
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1. koran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan

rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan Keputusan disetujui paling sedikit diambil 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan

pengambil alihan Perseroan paling lambat 14 (empat - belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang -- undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum --- Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat). - dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena --- dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Pengadilan, - maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk --- likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar --- Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -- usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak -

Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ----- pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkanya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----- diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ----- kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----
- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan --- bahwa : -----

- I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan ----- pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, maka telah ----- diangkat sebagai : -----

-Direktur : Tuan IMANUEL IMAN tersebut; --
Nyonya
-Komisaris : Nona TATI RINA tersebut. -----

- II. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi dan/ atau

baik bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan ---- hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang --- lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ----- Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang ---- dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan ----- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -----

dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan ---
lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Cisaat, --
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada kepala akta
ini, dengan dihadiri oleh Tuan JEJEN JAENUDIN dan -----
Tuan DEDEN NURFALAH, kedua-duanya pegawai Notaris, ---
bertempat tinggal di Sukabumi, sebagai saksi-saksi. ---
Segera setelah akta ini, saya Notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi

di Cisaat,



BISTOK SITUMORANG, SH